



**TINJAUAN YURIDIS  
TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TERPADU  
DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

**TESIS**

**AGUNG SUSANTO**

**1810622068**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**2021**



**TINJAUAN YURIDIS  
TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TERPADU  
DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Ilmu Hukum**

**AGUNG SUSANTO**

**1810622068**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**2021**

## PERNYATAAN ORISINASLITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Agung Susanto

NIM : 1810622068

Tanggal : 16 Juli 2021

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataannya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 16 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Agung Susanto

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Susanto

NIM : 1810622068

Program Studi : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalti Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Terpadu Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup” Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Agung Susanto

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis di ajukan oleh :

Nama : Agung Susanto

NPM : 1810622068

Program Studi : Hukum

Judul Tesis :

*“Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Terpadu Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan di terima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



Dr. Abdul Halim, M.Ag.  
Ketua Penguji



Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH.  
Penguji I



Prof. Dr. Agus Surono, SH., MH.  
Penguji II/ Pembimbing



Dr. Abdul Halim, M.Ag.  
Dekan



Dr. Beniharmoni Harefa, SH., LLM  
Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 24 Juli 2021

## ABSTRAK

Potensi persoalan lingkungan hidup yang dapat berpengaruh besar terhadap kelestarian alam dan kesehatan manusia menimbulkan kesadaran perlunya pengaturan masalah lingkungan hidup dengan perangkat hukum. Mekanisme penegakan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Tanggal 21 Januari 2015, yaitu dilakukan secara terpadu. Meskipun demikian, terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yaitu akibat belum jelasnya model penerapan dalam hal koordinasi antar lembaga, berakibat pada penegakan hukum secara terpadu kurang efisien dan efektif dalam implementasinya. Penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode Yuridis Normatif dan berjenis kualitatif dengan cara mengkaji berbagai macam data primer dan sekunder serta akan mendeskripsikan bagaimana penerapan terhadap penegakan hukum terpadu dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Tanggal 21 Januari 2015. Penyidikan yang tidak dilakukan secara terpadu dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup, maka pihak yang di dakwa dapat melakukan upaya hukum berupa pengajuan praperadilan. Namun proses penegakan hukum yang tidak melalui tim penegakan hukum terpadu dianggap sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XII/2014 yang pada intinya hanya mewajibkan menggunakan sistem terpadu antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri, tanpa mengatur lebih lanjut terkait pelaksanaan menggunakan tim dalam mengimplementasikan keterpaduan tersebut.

**Kata kunci: tindak pidana lingkungan hidup, penegakan hukum terpadu.**

## **ABSTRACT**

The potential for environmental problems that can have a major impact on the preservation of nature and human health raises awareness of the need to regulate environmental issues with legal instruments. The mechanism for enforcing environmental crimes in Indonesia is contained in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and the Decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XII/2014 dated January 21, 2015, which is carried out in an integrated manner. However, there are obstacles in its implementation, namely due to the unclear implementation model in terms of coordination between institutions, resulting in an integrated law enforcement that is less efficient and effective in its implementation. This research is a library research using normative juridical and qualitative methods by examining various kinds of primary and secondary data and will describe how the application of integrated law enforcement in environmental crimes is based on Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment and the Decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XII/2014 Dated January 21, 2015. Investigations that are not carried out in an integrated manner in the law enforcement process against environmental crimes, the party indicted can take legal action in the form of a pretrial submission. However, the law enforcement process that does not go through an integrated law enforcement team is considered legally valid and does not conflict with the Constitutional Court Decision Number: 18/PUU-XII/2014 which in essence only requires the use of an integrated system between Civil Servant Investigators, Police, and Prosecutors in under the coordination of the Minister, without further regulating the implementation of using a team to implement the integration.

**Keywords: environmental crime, integrated law enforcement.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah SWT untuk rahmat dan karuniannya dan Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW., sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Terpadu Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”.

Penyusunan tesis merupakan bagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini secara tulus penulis menyampaikan terimakasih kepada Fajar Rudiyantri, istri yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan semangat, Randy, Angger dan Nimas anak-anak tercinta atas semangat dan keceriaan, Orang tua penulis, dan seluruh keluarga besar, serta rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama kepada :

1. **Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA sebagai Rektor UPN Veteran Jakarta.**
2. **Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta sekaligus penguji.**
3. **Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LLM sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum UPN Veteran Jakarta**
4. **Bapak Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H. sebagai Pembimbing sekaligus penguji.**
5. **Bpk, Dr. Handoyo Prasetyo, SH. MH.. selaku Tim Penguji Tesis kami.**
6. Seluruh dosen dan staf administrasi pada program magister Hukum UPN Veteran Jakarta, yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
7. Seluruh rekan-rekan Magister Hukum kelas kampus UPN Veteran Jakarta angkatan 2018 yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat. Amin yaa rabbal alamin.

Jakarta, Juli 2021

Penulis

Agung Susanto  
NIM 1810622068



## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL .....   | i    |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....   | ii   |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....  | iii  |
| LEMBAR PENGESAHAN .....   | iv   |
| ABSTRAK .....   | v    |
| <i>ABSTRACT</i> .....   | vi   |
| KATA PENGANTAR .....  | vii  |
| DAFTAR ISI .....  | viii |
| <br>  |      |
| BAB I PENDAHULUAN.....  | 1    |
| I.1. Latar Belakang Masalah .....   | 1    |
| I.2. Perumusan Masalah .....  | 7    |
| I.3. Tujuan Penelitian .....  | 8    |
| I.4. Manfaat Penelitian .....   | 8    |
| I.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual .....  | 8    |
| I.6. Metode Penelitian .....  | 22   |
| I.7. Sistematika Penulisan .....  | 26   |
| <br>  |      |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....   | 27   |
| II.1. Tinjauan Hukum Lingkungan Hidup.....  | 27   |
| A. Tinjauan Lingkungan Hidup.....   | 27   |
| B. Tinjauan Hukum Lingkungan .....  | 29   |
| II.2. Metode Penegakan Hukum.....   | 35   |
| A. Pengertian Penegakan Hukum .....   | 35   |
| B. Metode Penegakan Hukum di Indonesia.....   | 41   |
| II.3. Perkembangan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia .....  | 48   |
| A. Pengaturan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982.....   | 49   |
| B. Pengaturan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 .....   | 52   |
| C. Pengaturan Undang-UUndang No. 32 tahun 2009 .....  | 57   |
| <br>  |      |
| BAB III METODE PENELITIAN .....   | 60   |
| III.1. Jenis Penelitian .....   | 60   |
| III.2. Pendekatan Penelitian .....  | 62   |
| III.3. Teknik Pengumpulan Data .....  | 62   |
| III.4. Analisis Data .....  | 65   |
| <br>  |      |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....   | 68   |
| IV.1. Penegakan Hukum Secara Terpadu dalam Penanganan Tindak<br>Pidana Lingkungan Hidup Menurut Hukum -Acara Pidana di<br>Indonesia ..... | 68   |

|  |    |
|--|----|
| IV.2. Akibat Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap<br>Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Tidak Melalui Tim<br>Penegakan Hukum Terpadu ..... | 78 |
| BAB V PENUTUP .....  | 85 |
| V.1 Kesimpulan .....   | 85 |
| V.2. Saran .....   | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 87 |
| RIWAYAT HIDUP .....  |    |